



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF SUBEKTI**
2. Jabatan : **KOORDINATOR PRODI**
3. NHK : **241782**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 587.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 405.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/21 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/21 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 14.750.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 750.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, WARISAN Rp. 2.500.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 2BJ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.050.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.507.716**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 625.307.716



III. HUTANG

Rp. 475.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 150.307.716

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.